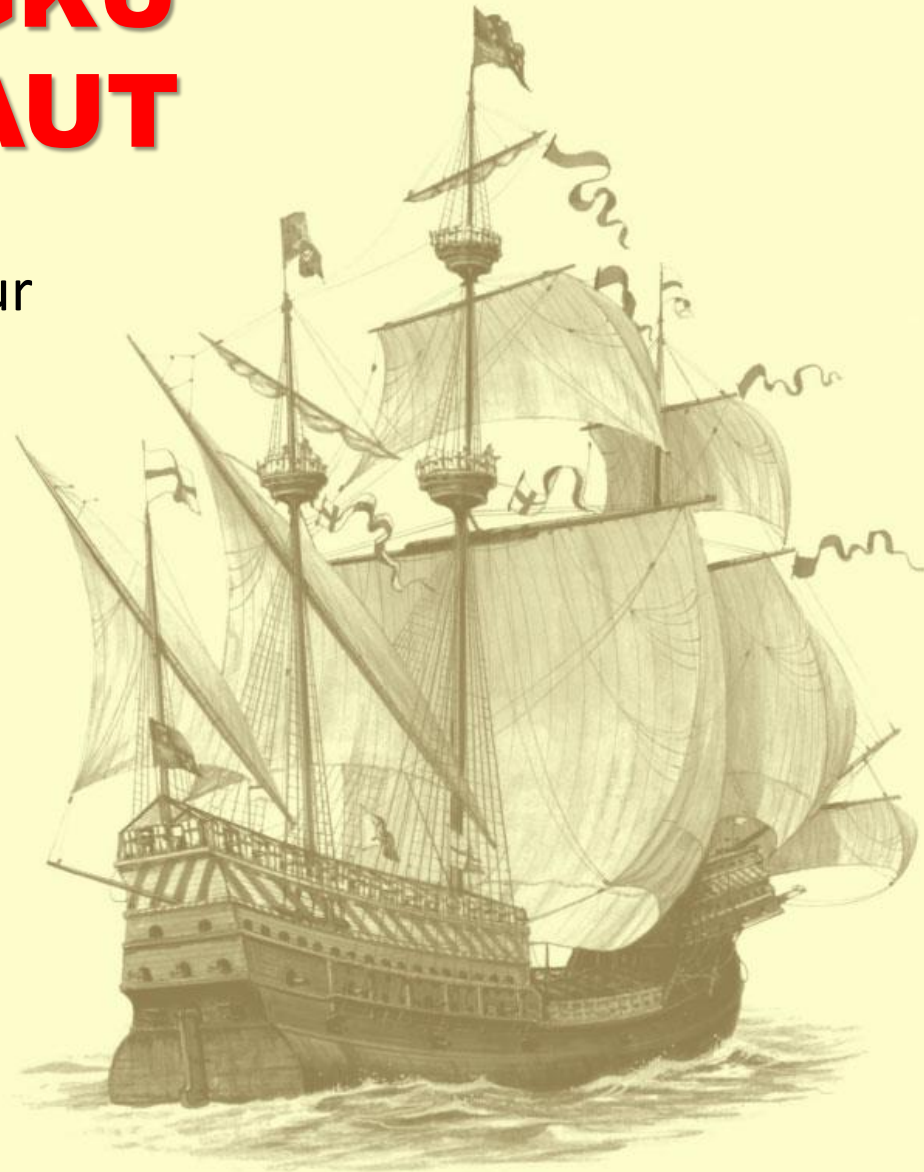


NENEK MOYANGKU SEORANG PELAUT

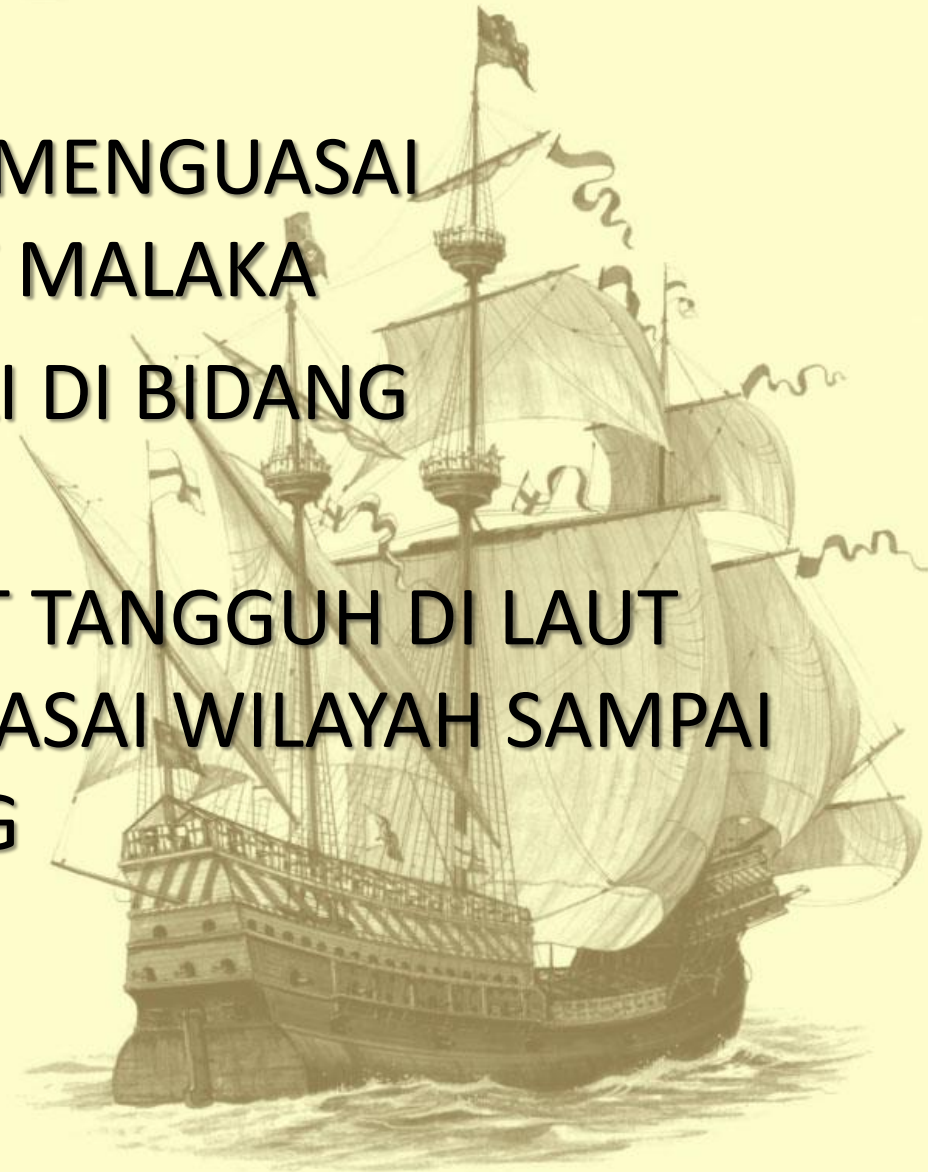
“Visi Indonesia Bersatu,
Berdaulat, Adil, dan Makmur
Berbasis Kemaritiman”

Disampaikan Dalam Pelatihan Kader Lanjutan PMII
1 Desember 2014
Mahendra Putra Kurnia
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman



NUSANTARA

- KERAJAAN SRIWIJAYA MENGUASAI PERDAGANGAN SELAT MALAKA
- KERAJAAN GOWA AHLI DI BIDANG PERDAGANGAN LAUT
- KERAJAAN MAJAPAHIT TANGGUH DI LAUT DAN MAMPU MENGUASAI WILAYAH SAMPAI KE NEGARA SEBERANG

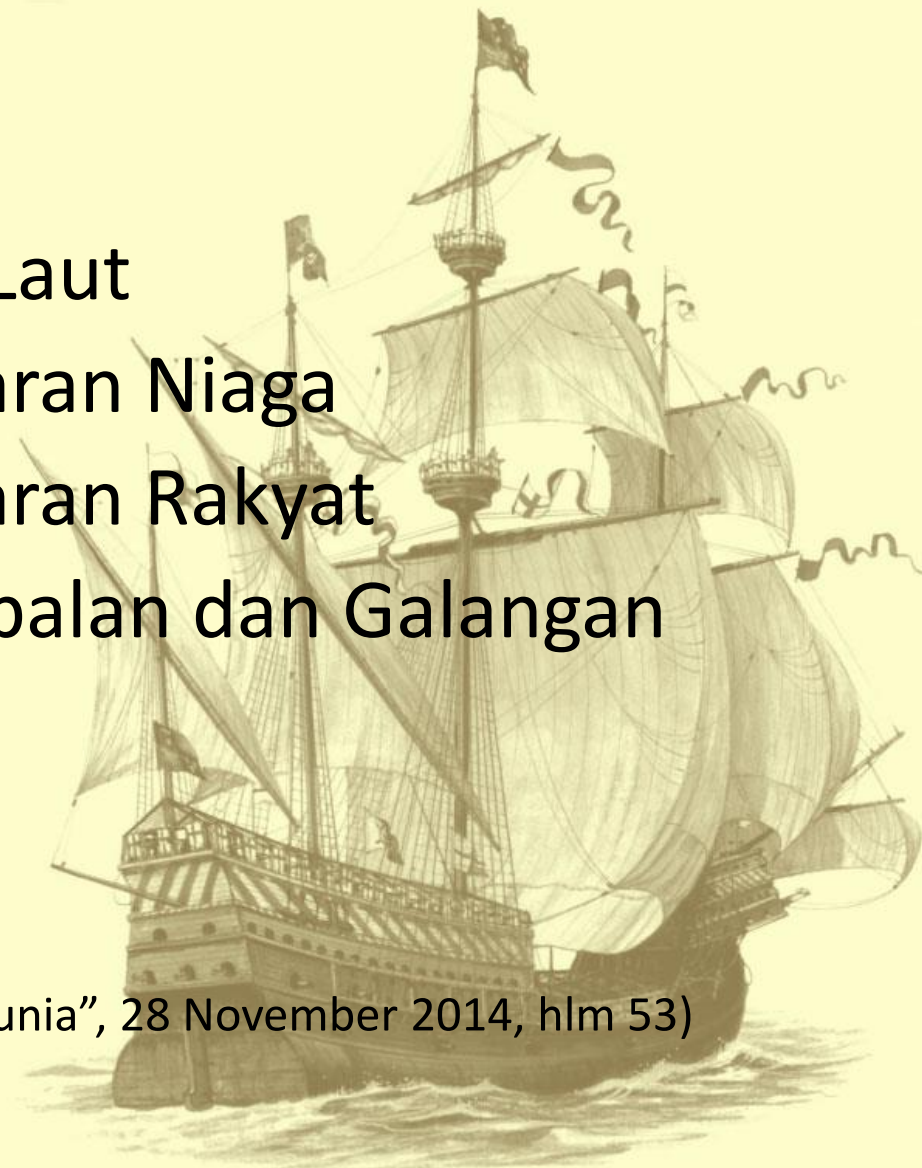


INDONESIA HARI INI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (*air space*), duapertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan, Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), struktur pulau-pulaunya tersebar luas dalam jumlah lebih dari 17.508 buah pulau kecil dan besar dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 81.000 km. Kurang lebih 6 juta km² wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah.

INDONESIA HARI INI

- Potensi Geografis
- Potensi Sumber Daya Laut
- Potensi Industri Pelayaran Niaga
- Potensi Industri Pelayaran Rakyat
- Potensi Industri Perkapalan dan Galangan Kapal



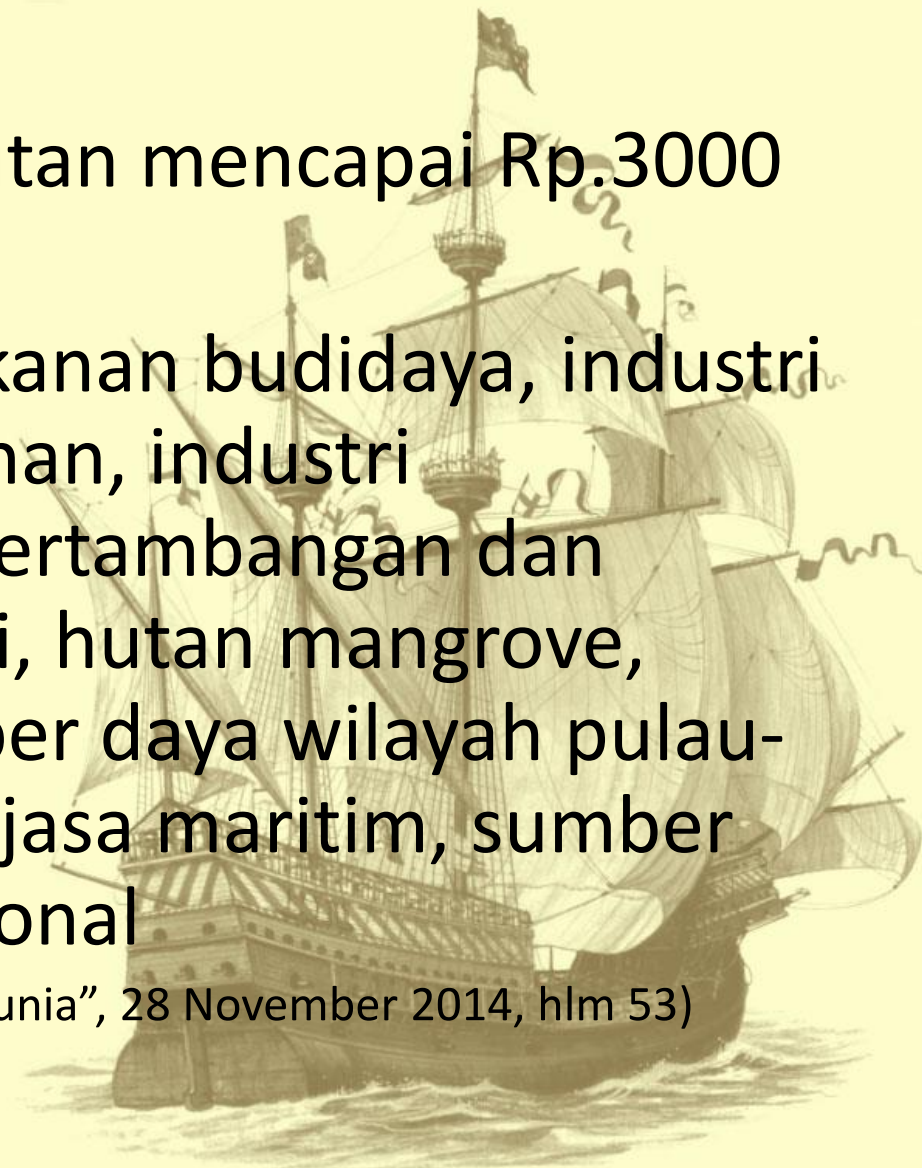
(Kompas, "Menegakkan Poros Maritim Dunia", 28 November 2014, hlm 53)

INDONESIA HARI INI

- Potensi ekonomi kelautan mencapai Rp.3000 Triliun

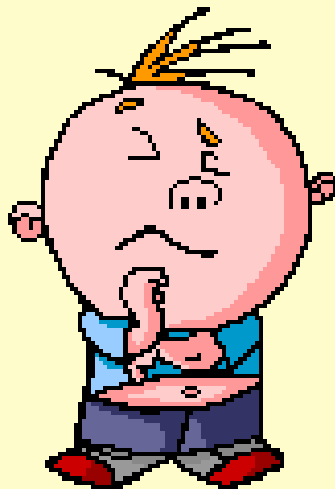
Perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, hutan mangrove, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, sumber daya alam non-konvensional

(Kompas, "Menegakkan Poros Maritim Dunia", 28 November 2014, hlm 53)



INDONESIA HARI INI

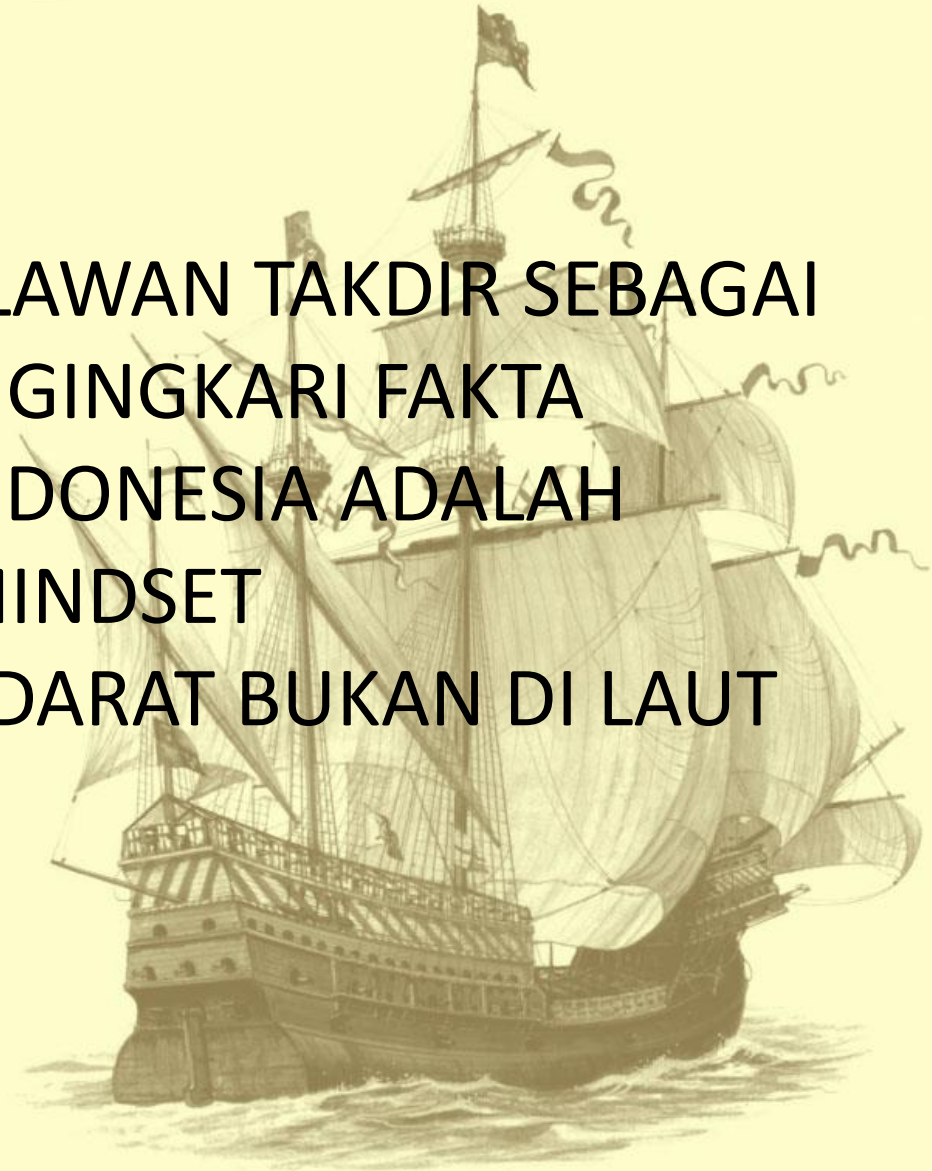
SEKTOR MARITIM BELUM MENJADI PRIORITAS
UNTUK MENCAPAI CITA DAN TUJUAN NEGARA
INDONESIA



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

1. FAKTOR FILOSOFIS

INDONESIA SEOLAH MELAWAN TAKDIR SEBAGAI NEGARA MARITIM, MENGINGKARI FAKTA BAHWA 70% WILAYAH INDONESIA ADALAH PERAIRAN, SEHINGGA MINDSET PEMBANGUNANNYA DI DARAT BUKAN DI LAUT



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

2. FAKTOR TEORITIS

LUPA AKAN DEKLARASI JUANDA 1957
KESALAHAN PEMIKIRAN YANG LEBIH
MENGUTAMAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR
DARAT DIBANDING PEMBANGUNAN SEKTOR
PERAIRAN

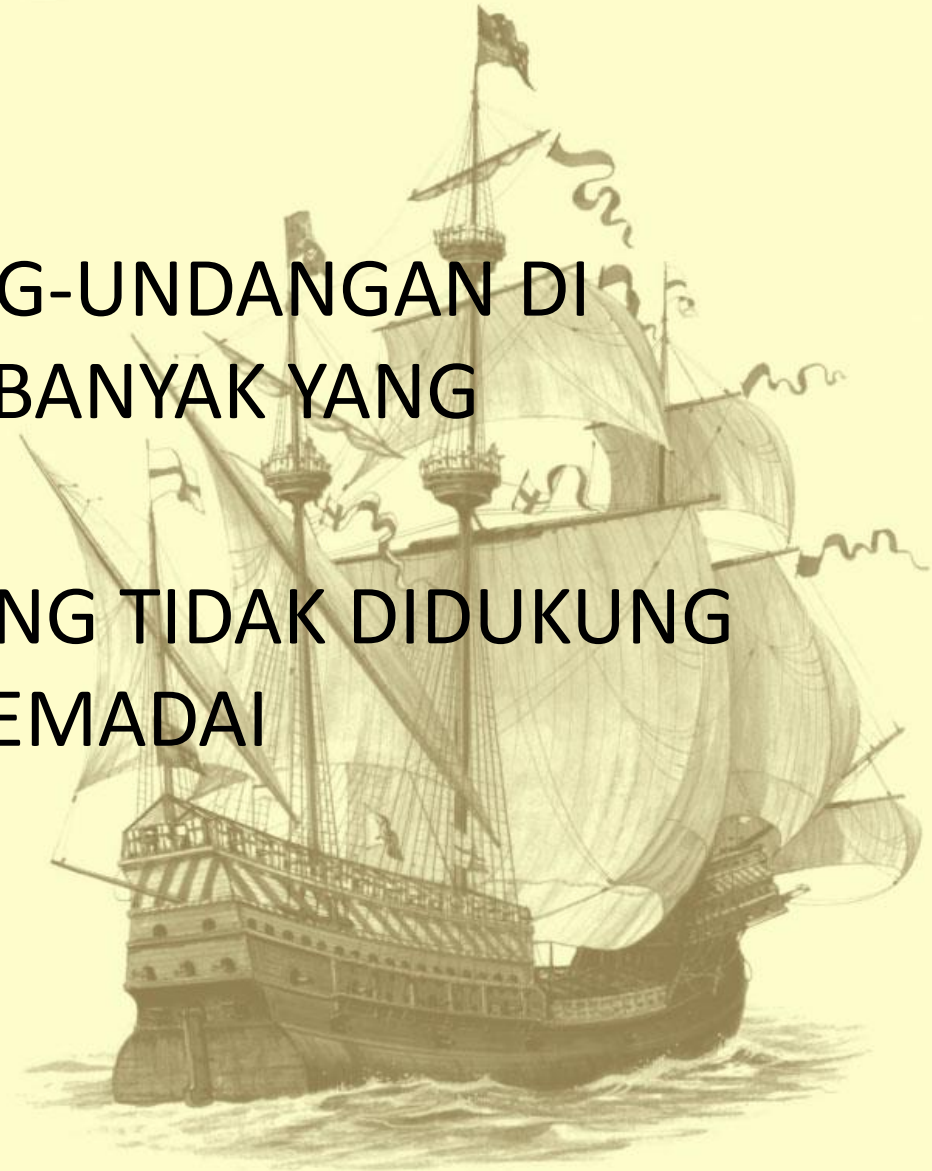


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

3. FAKTOR YURIDIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
BIDANG KEMARITIMAN BANYAK YANG
TUMPANG TINDIH

PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK DIDUKUNG
SARANA PRASARANA MEMADAI



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

4. FAKTOR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

PRIORITAS PELITA JAMAN ORDE BARU TIDAK MENGARAH KE SEKTOR PERAIRAN TETAPI *LAND BASE ORIENTED*

“Sebab utamanya adalah oleh karena bangsa kita tidak pernah menetapkan sebuah *road map* dalam pembangunan, tidak pernah membuat sebuah peta bumi perjalanan bangsa. Karena *road map* nasional itu tidak pernah dimiliki dan tidak pernah dipegang teguh dan tidak mengikat kita sebagai *milestone* atau *benchmark* pembangunan, maka setiap kali terjadi pergantian pemerintahan dengan mudah membuat rencana yang baru dan membuang yang lama”. (Dimiyati Hartono)

“...banyak pejabat Indonesia selain tidak paham Hukum Laut Internasional meskipun memerintah negara kepulauan juga tidak punya kesadaran ruang (*raum bewustsein*) dan kesadaran garis batas (*grenz bewustsein*) sebagaimana diajarkan dalam geopolitik... (Wahyono SK)

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

5. FAKTOR KELEMBAGAAN

BANYAK LEMBAGA YANG MENGURUS SEKTOR PERAIRAN TETAPI MINIM KOORDINASI DAN EGO SEKTORAL



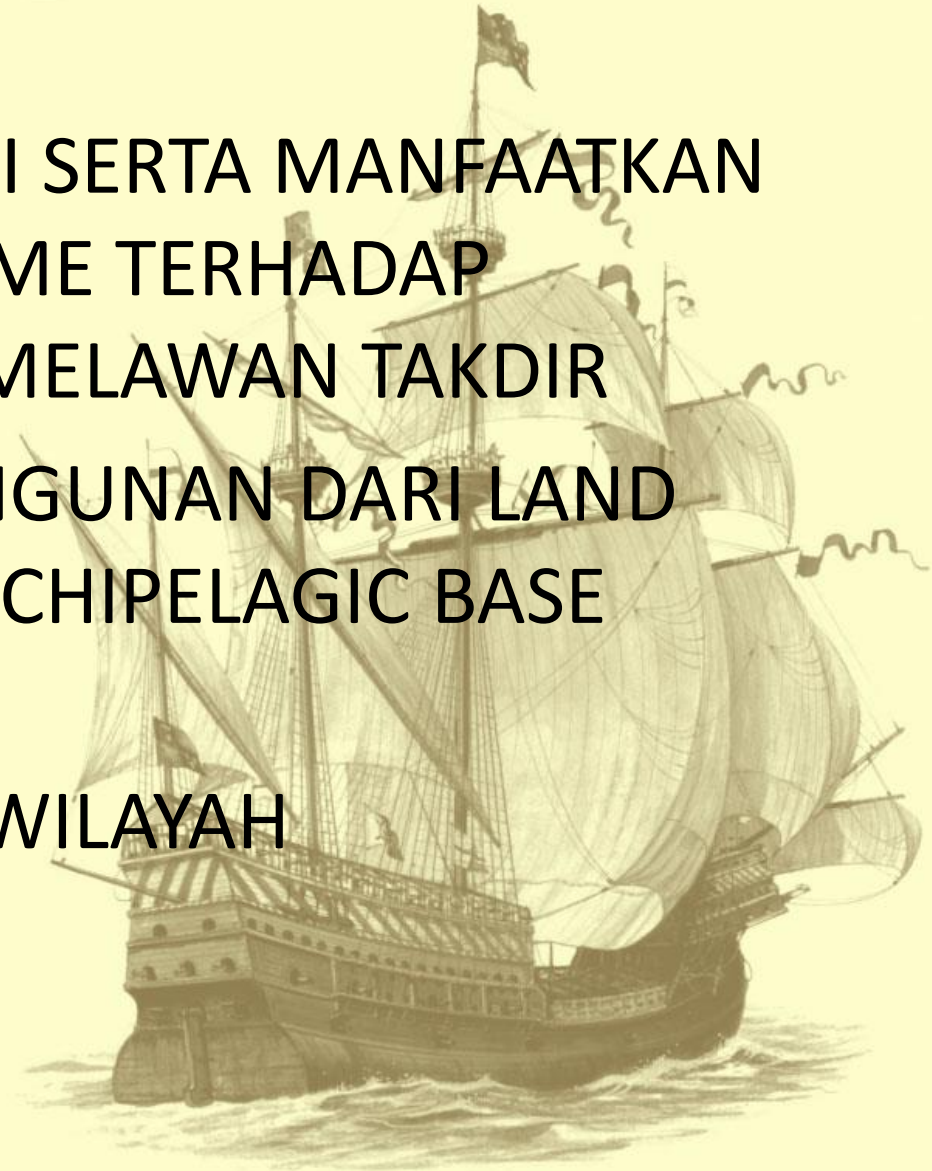
STRATEGI JITU OPTIMALISASI SEKTOR MARITIM

- PENDEKATAN POLA PIKIR
- PENDEKATAN EKONOMI KESEJAHTERAAN
- PENDEKATAN POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN



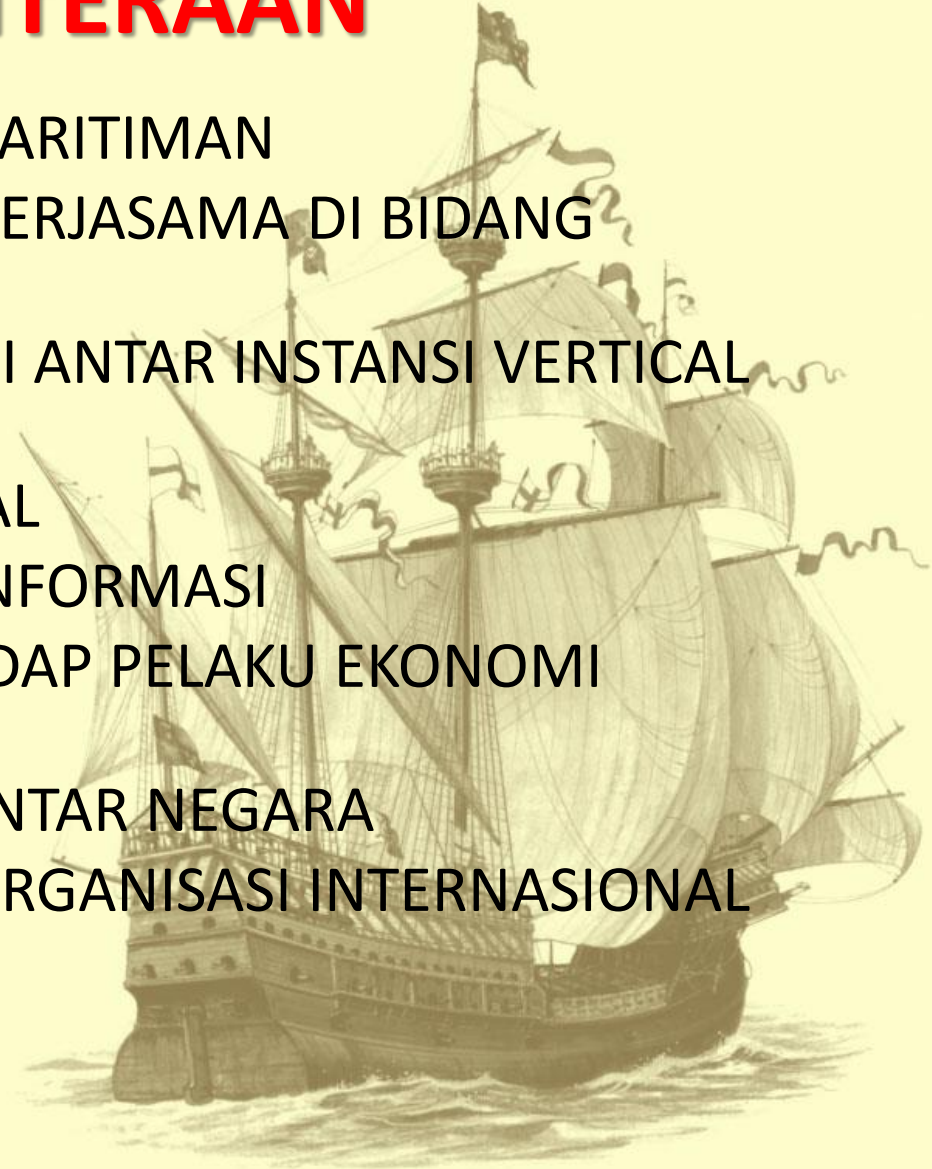
PENDEKATAN POLA PIKIR

- SYUKURI DAN NIKMATI SERTA MANFAATKAN PEMBERIAN TUHAN YME TERHADAP INDONESIA, JANGAN MELAWAN TAKDIR
- RUBAH POLA PEMBANGUNAN DARI LAND BASE ORIENTED KE ARCHIPELAGIC BASE ORIENTED
- SADAR AKAN RUANG WILAYAH



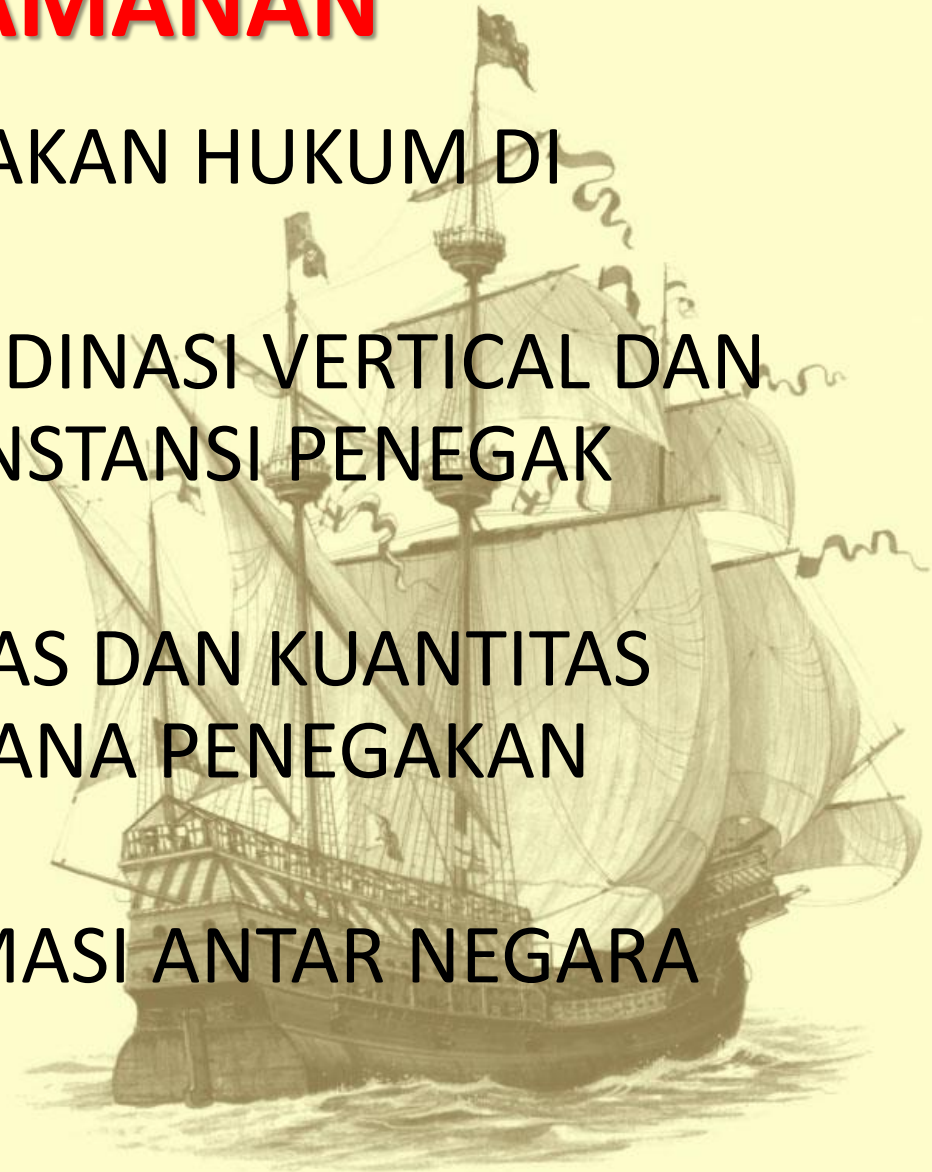
PENDEKATAN EKONOMI KESEJAHTERAAN

- OPTIMALISASI POTENSI KEMARITIMAN
- DIVERSIFIKASI USAHA DAN KERJASAMA DI BIDANG KEMARITIMAN
- MAKSIMALISASI KOORDINASI ANTAR INSTANSI VERTICAL DAN HORIZONTAL
- MINIMALISASI EGO SEKTORAL
- OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASI
- AFIRMATIVE ACTION TERHADAP PELAKU EKONOMI KEMARITIMAN
- OPTIMALISASI DIPLOMASI ANTAR NEGARA
- PERKUAT POSISI TAWAR DI ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG EKONOMI



PENDEKATAN POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN
- MAKSIMALISASI KOORDINASI VERTICAL DAN HORIZONTAL ANTAR INSTANSI PENEGAK HUKUM DI PERAIRAN
- PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PENEGAKAN HUKUM
- OPTIMALISASI DIPLOMASI ANTAR NEGARA



TERIMA KASIH

